



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Nomor : 1 /Pansel-JPT-Polhukam/2/2021

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JPT yang lowong
 - a. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum
 - b. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum
2. Persyaratan Umum :
 - 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Mei 2021;
 - 3) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk.I (IV/b) dan pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 4) Sekurang-kurangnya telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II atau yang disetarakan;
 - 5) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 6) Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
 - 8) Memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
 - 9) Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1), diutamakan Magister/Pascasarjana (S-2);
 - 10) Memiliki bukti laporan SPT Tahun Terakhir;
 - 11) Melampirkan bukti menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN;

- 12) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- 14) Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Persyaratan Khusus

- a. Untuk Jabatan Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum adalah mengutamakan standar kompetensi bidang yang memiliki pengalaman dan penugasan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum privat dan materi hukum publik.
- b. Untuk Jabatan Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum adalah mengutamakan standar kompetensi bidang yang memiliki pengalaman dan penugasan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penegakan hukum.

3. 1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	1. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum 2. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	Eselon II.a
3.	Unit Kerja	:	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
No			
Kompetensi		Level	
1	2	3	
1.	Integritas	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi (Int. 4)	
2.	Kerjasama	Membangun komitmen tim sinergi (K.4)	
3.	Komunikasi	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan (K.4)	
4.	Orientasi pada hasil	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya (O.4)	
5.	Pelayanan Publik	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang,	

		kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional (P.4)
6.	Pengembangan diri dan orang lain	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran (P.4)
7.	Mengelola perubahan	Memimpin perubahan pada unit kerja (M.4)
8.	Pengambilan Keputusan (PK)	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan mitigasi risiko (PK.4)

3.2. STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

1.	Nama Jabatan	:	1. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum 2. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	Eselon II.a
3.	Unit Kerja	:	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
No	Kompetensi	Level	
1	2	3	
1.	Perekat Bangsa	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi (M.4)	

4. Waktu dan Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dimulai tanggal 22 s.d. 26 Februari 2021;
- b. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta dokumen seperti:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan format terlampir);
 - 2) Formulir Rekam Jejak (Sesuai dengan format terlampir)
 - 3) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 4) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - 5) Salinan sah penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
 - 6) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (tautan contoh Surat Persetujuan terlampir);
 - 7) Salinan sah ijazah yang dipersyaratkan;
 - 8) Bukti Penyerahan SPT Tahun terakhir;
 - 9) Bukti penyampaian LHKPN/LHKASN;
 - 10) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- 11) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
 - 12) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - 13) Pas Foto dengan background merah;
 - 14) Salinan Sah Tanda Tamat Diklat Teknis/Diklat Fungsional;
 - 15) Dokumen pendukung lainnya (Jika ada).
- c. Seluruh dokumen dilampirkan dalam bentuk **format pdf** kecuali pada angka 13 menggunakan format JPG/JPEG dan dilakukan pendaftaran melalui website <https://sipenjapti.id> dan dokumen dikirimkan melalui alamat email polhukam.kepeg@gmail.com.
- d. Tahapan seleksi sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan Penerimaan berkas lamaran seleksi terbuka pengisian JPT Pratama	22 – 26 Februari 2021
2	Pengolahan data dan verifikasi berkas kandidat	1- 2 Maret 2021
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	3 Maret 2021
4	Pemanggilan para kandidat yang lulus administrasi melalui <i>video conference</i>	5 Maret 2021
5	Tes Kompetensi Bidang (Akademisi) (<i>online</i>)	8 Maret 2021
6	Tes Assesment (<i>online</i>)	9 Maret 2021
7	Penelusuran Rekam jejak, Paparan Visi dan Misi serta Wawancara (pendalaman hasil Kompetensi Bidang) melalui <i>video conference</i>	10 Maret 2021

Apabila ada perubahan jadwal akan diumumkan lebih lanjut melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan www.polkam.go.id

5. Ketentuan Lain – lain

- a. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar.
- b. Panitia Seleksi tidak melayani surat-menyurat dan korespondensi lainnya.
- c. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 18 Februari 2021

Ketua Panitia Seleksi,

